

Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)

SNIP

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id

Kajian Potensi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pringsewu Cicih Daniasri ^{a,*} , Ika Kustiani^b dan Gigih Forda ^c

¹Bagian Administrasi Pembanguna, Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu. Jl. Komplek Pemda Pringsewu

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat artikel: Masuk 10 Agustus 2023 Diterima 10 September 2023

Kata kunci: Agropolitan Pertanian Komoditi unggulan Gadingrejo Pringsewu Pertanian tanaman pangan merupakan produk yang menjadi bahan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dan memenuhi gizi bagi konsumsi masyarakat. Kabupaten Pringsewu memiliki posisi strategis untuk menjaga ketersediaan tanaman pangan dan arah pengembangan wilayah Kabupaten Pringsewu yaitu di Kecamatan Gadingrejo. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011 – 2031 bahwa Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) dikawasan perkotaan Kecamatan Gadingrejo berfungsi sebagai pusat agropolitan. Artinya, pengembangan wilayah budidaya sektor pertanian tanaman pangan dapat dilakukan melalui pendekatan agropolitan. Pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan salah satu pendekatan pembangunan perdesaan berbasis pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah mix method dengan pendekatan deduktif. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik sektor pertanian tanaman pangan di Kecamatan Gadingrejo serta mengidentifikasi peran dan pengaruh sektor pertanian tanaman pangan di Kecamatan Gadingrejo sebagai kawasan agropolitan terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Pringsewu. Hasil Penelitian ini menunjukkan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Gadingrejo memiliki posisi strategis dan berperan sebagai sektor basis yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian wilayah Kabupaten Pringsewu.

1. Pendahuluan

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu daerah berkembang di Provinsi Lampung yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi terutama pada sektor perdagangan, pertanian dan industri, sehingga paradigma pembangunan ekonomi di daerah ini harus segera dititikberatkan pada keselarasan pengembangan pertanian yang kuat dengan industri yang maju dengan bertumpu pada pengembangan potensi sumberdaya lokal. Seiring dengan itu, di sisi lain pengembangan potensi ekonomi daerah juga harus mengedepankan upaya-upaya membuka ruang bagi terciptanya demokrasi ekonomi yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan. Salah satu kebijakan yang telah ditetapkan di dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah di Kabupaten Pringsewu adalah memanfaatkan serta mengembangkan potensi ekonomi daerah sesuai sumberdaya alam dan sumberdayasumberdaya lainnya yang dimiliki. Pengembangan pertanian merupakan salah satu kekuatan inti (core business) perekonomian daerah yang secara alami mempunyai prospek tidak hanya dalam skala lokal dan regional, namun harus mampu bersaing dalam skala regional, nasional, maupun internasional.

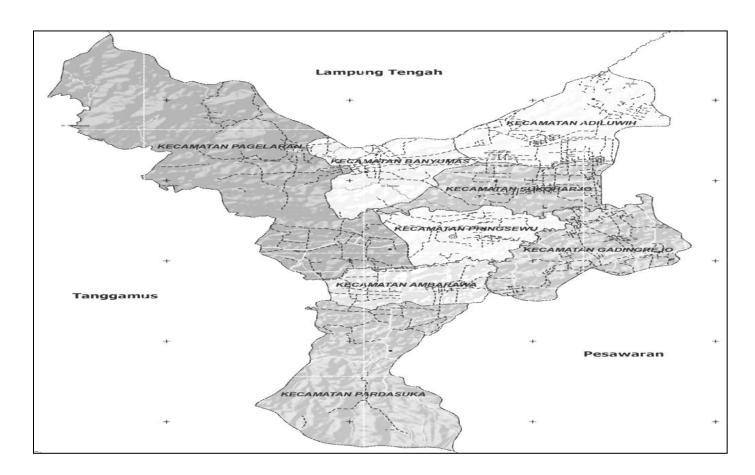
Agropolitan diartikan sebagai upaya pengembangan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis, yang diharapkan dapat melayani dan pembangunan kegiatan-kegiatan mendorong pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) merupakan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Munculnya konsep agropolitan dilatarbelakangi oleh gagalnya beberapa teori dan konsep pembangunan di masa lalu. Penerapan model pusat-pusat pertumbuhan di negara berkembang seperti Indonesia, melalui strategi industrialisasi dan agroindustri yang relatif memiliki pertumbuhan cepat, ternyata justru menyebabkan ketimpangan yang semakin besar antara kawasan perdesaan yang berbasis pertanian dengan kawasan agroindustri yang berbasis manufaktur dan jasa. Pembangunan kawasan agropolitan di Kabupaten Pringsewu pada hakekatnya merupakan pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan wilayah (regional development) pendekatan usaha kemasyarakatan yang berbasis kepada sektor

*cicihdaniasri15@gmail.com

²³Program Studi Program Profesi Insinyur, Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, Bandarlampung 35145

agribisnis komoditas unggulan yang didukung oleh sektor penunjangnya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031 bahwa penetapan kawasan agropolitan direncanakan akan dikembangkan di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pringsewu yaitu meliputi Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Adiluwih. Sedangkan hasil Studi Pengembangan Kawasan Agropolitan Tahun 2012 bahwa penetapan Wilayah Kawasan Agropolitan berdasarkan komponen tipologi, keragaman produksi, infrastruktur, dan kelembagaan berada di Kecamatan Pringsewu, Gading Rejo dan Kecamatan Sukoharjo. Berdasarkan hal tersebut maka dibuat

matrik interaksi, sehingga ditetapkanlah bahwa Kecamatan Gading Rejo ditentukan sebagai Wilayah Kawasan Agropolitan. Kecamatan Gading Rejo sebagai kawasan agropolitan diharapkan dapat menjalankan sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan yang melayani dan mendorong kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya, Potensi agropolitan untuk keragaman produksi di wilayah Kecamatan Gading Rejo sangat mendukung, di mana kegiatan agribisnis yang terdapat di wilayah ini terdiri dari agribisnis hulu, usaha tani primer, dan agribisnis hilir.



Gambar 1.1. Gambar Konfigurasi Spasial Wilayah Kecamatan

Keterangan:

- : Jalur pergerakan pemasaran komoditi
- : Kawasan perkotaan
- : Kawasan produksi pertanian
- : Kawasan produksi perkebunan
- : Kawasan produksi peternakan dan perikanan

2. Metodologi

Kegiatan penyusunan Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pringsewu dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan eksploratif, dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi dari narasumber atau berbagai pelaku yang terlibat dengan rencana induk pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pringsewu. Data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan melalui survei instansional dan pengumpulan pustaka yang berhubungan dengan lingkup kajian, serta peraturan-peraturan daerah yang terkait. Peraturan-peraturan yang dikaji adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada beberapa sektor terkait dengan pengembangan Kawasan Agropolitan baik yang berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu, serta Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei di lapangan. Metode survei lapang yang digunakan adalah metode wawancara, pengisian daftar pertanyaan (kuesioner) dan Sampel studi ditetapkan melalui pendekatan purposive sampling, yang didasarkan atas keterwakilan obyek studi. Data yang telah dikumpulkan, baik data sekunder maupun data primer, kemudian diolah melalui tahapan kegiatan editing, coding dan tabulating menurut pengelompokkan berdasarkan klasifikasi masing-masing data. Analisis data dilakukan dengan cara menampilkan tabel frekuensi, yang kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil analisis data selanjutnya diinterprestasi untuk mendapatkan berbagai masukan sesuai dengan tujuan kajian.

2.1 Lokasi dan Objek

Kawasan agropolitan di Kecamatan Gading Rejo dan wilayah hinterland-nya yang sesuai untuk Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pringsewu, kajian akan difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut.

- 1.Inventarisasi dan Identifikasi kondisi eksisting kawasan agropolitan.
- 2.Kajian geografis dan kedudukan wilayah kawasan agropolitan terhadap daerah atau wilayah di sekitarnya.
- 3.Identifikasi tipologi kawasan agropolitan.
- 4.Kajian pengembangan kawasan agropolitan, yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut.
- a.dentifikasi sistem hierarki kawasan perdesaan (perkampungan),
- b.Kajian pola keterkaitan keruangan antara pusat kawasan agropolitan (DPA) dengan desa/pekon hinterland atau wilayah sekitarnya.
- c.Kajian terhadap sistem pendukung kegiatan, yang terdiri dari:
- -perumusan skenario pengembangan kawasan yang sesuai tipologi Kawasan Agropolitan Kabupaten Pringsewu; dan
- -penyusunan strategi kebijakan pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pringsewu.

2.2 Peralatan pelaksanaan

Analisa Kawasan Agropolitan Kabupaten Pringsewu dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan eksploratif, dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi dari narasumber atau

berbagai pelaku yang terlibat dengan rencana induk pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pringsewu.

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan melalui survei instansional dan pengumpulan pustaka yang berhubungan dengan lingkup kajian, serta peraturan-peraturan daerah yang terkait. Peraturan-peraturan yang dikaji adalah peraturanperaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada beberapa sektor terkait dengan pengembangan Kawasan Agropolitan baik yang berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu, serta Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei di lapangan. Metode survei lapang yang digunakan adalah metode wawancara, pengisian daftar pertanyaan (kuesioner) dan observasi. Sampel studi ditetapkan melalui pendekatan purposive sampling, yang didasarkan atas keterwakilan obyek studi.

Data yang telah dikumpulkan, baik data sekunder maupun data primer, kemudian diolah melalui tahapan kegiatan editing, coding dan tabulating menurut pengelompokkan berdasarkan klasifikasi masing-masing data. Analisis data dilakukan dengan cara menampilkan tabel frekuensi, yang kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil analisis data selanjutnya diinterprestasi untuk mendapatkan berbagai masukan sesuai dengan tujuan kajian.

2.3 Pengumpulan Data

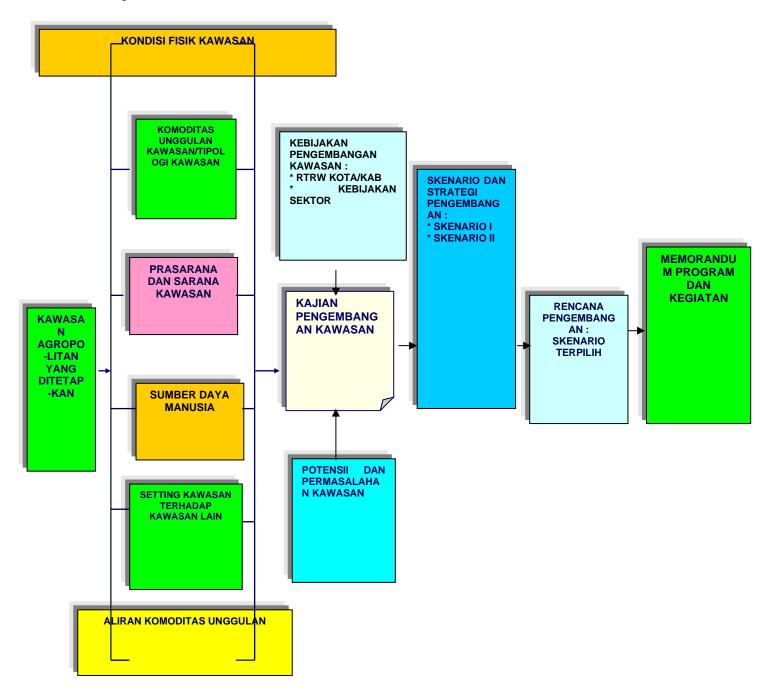
Kegiatan survei lapang meliputi kegiatan pengumpulan data sekunder dan primer. Data sekunder merupakan pelengkap dari data sekunder yang telah dikumpulkan pada tahap persiapan sebelumnya. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa/pekon. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden, serta pengisian daftar pertanyaan.

2.4 Pengolahan Data

Analisis data dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang tidak dapat dikuantifikasikan. Pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri sebab akibat atau interaksi dari tiap-tiap masalah secara kualitatif, kemudian disimpulkan berdasarkan analogi atau berdasarkan penilaian ahli. Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif dikemukakan secara deskriptif.

Analisis kuantitatif digunakan untuk data yang dapat dikuantifikasikan. Data diolah menggunakan tabulasi atau menggunakan formula statistik/matematis.

3. Hasil dan pembahasan



STRATEGI PENGEMBANGAN

Pembangunan dan pengembangan Kawasan Agropolitan Gading Rejo pada dasarnya merupakan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dalam suatu kawasan agribisnis yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi daerah untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi yang digerakkan oleh masyarakat Kecamatan Gading Rejo sendiri dan difasilitasi oleh pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Pemerintah Provinsi Lampung, maupun Pemerintah Pusat.

- a. Pembangunan dan pengembangan kawasan pada dasarnya merupakan pengembangan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di Kawasan Agropolitan.
- b. Kawasan Agropolitan Gading Rejo yang akan dikembangkan merupakan suatu kesatuan kawasan yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas masyarakat dalam satu sistem dan usaha agribisnis secara berkaitan dan berkesinambungan. Oleh karenanya diperlukan suatu perencanaan pengembangan manajemen pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kawasan, serta sumber-sumber pembiayaan yang dapat dipergunakan dalam pengembangan Kawasan Agropolitan.
- c. Dalam upaya pengembangan Kawasan Agropolitan Gading Rejo, perlu dilakukan upaya memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ekonomi lokal termasuk lembaga-lembaga ekonomi yang berada di Kecamatan Gading Rejo

SKENARIO PENGEMBANGAN

Sesuai dengan tujuan dari pembangunan kawasan agropolitan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi perdesaan dan pemanfaatan potensi unggulan, mempercepat terbentuknya struktur sistem kota-kota dengan Pekon Pusat Pertumbuhan (P3) sebagai simpul terkecil melalui perwujudan urban - rural linkages, serta mengurangi arus migrasi penduduk ke kota-kota terdekat, maka strategi pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan Gading Rejo didekati dengan prinsipprinsip bertahap, berkesinambungan, terpadu, dan fungsional. realisasi pengembangan Kawasan Agropolitan Gading Rejo didasarkan pada skala prioritas pembangunan yang sekaligus juga merupakan dasar pembangunan kawasan secara integral, terpadu, dan menyeluruh. Oleh karena itu, dalam penentuan skala prioritas pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Agropolitan Gading Rejo perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis Kawasan Agropolitan Gading Rejo.

Prioritas Program Pembangunan

Prioritas pembangunan setiap unit Kawasan Agropolitan adalah merupakan penjabaran dari rumusan tujuan pembangunan yang dinilai perlu dan segera dilaksanakan. Tetapi dilihat dari segi kemampuan penanganan pembangunan yaitu secara teknis dan kemampuan pendanaan sangat sulit kiranya secara serentak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu adanya skala prioritas pelaksanaan pembangunan program dan proyek sesuai dengan tingkat diharapkan mampu memberikan kepentingannya, dan rangsangan pada perkembangan pembangunan sektor/sub sektor lainnya. Dalam kaitan ini, diharapkan program-program pembangunan tersebut dapat menjadi dasar dalam penyusunan proyek-proyek pembangunan Kawasan Agropolitan hingga akhir tahun perencanaan. Untuk merealisasikan tahapan pelaksanaan pembangunan tersebut, maka disusun prioritas pembangunan dengan didasarkan pada 5 (lima) strategi pembangunan Kawasan Agropolitan sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
- 2. Pengembangan permodalan.
- 3. Pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat.
- 4. Pengembangan usaha agribisnis.
- 5. Pengembangan sarana prasarana dan iklim usaha.

4. Kesimpulan

Prioritas pembangunan setiap unit Kawasan Agropolitan adalah merupakan penjabaran dari rumusan tujuan pembangunan yang dinilai perlu dan segera dilaksanakan. Tetapi dilihat dari segi kemampuan penanganan pembangunan yaitu secara teknis dan kemampuan pendanaan sangat sulit kiranya secara serentak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu adanya skala prioritas pelaksanaan pembangunan program dan proyek sesuai dengan tingkat dan diharapkan mampu memberikan kepentingannya. rangsangan pada perkembangan pembangunan sektor/sub sektor lainnya. Dalam kaitan ini, diharapkan program-program pembangunan tersebut dapat menjadi dasar dalam penyusunan proyek-proyek pembangunan Kawasan Agropolitan hingga akhir tahun perencanaan. Prioritas utama yang dipakai untuk menentukan perkembangan fisik menurut urutan tahapan adalah perkembangan yang bersifat intensif dan ekspansif. Di samping itu, beberapa faktor pendukung terkait dalam setiap kegiatan yang direncanakan di dalam matriks indikasi program perlu dipertimbangkan baik dari segi teknis maupun kebijakan,

termasuk di dalamnya adalah aspek-aspek hukum penunang legalitas pelaksanaan program pengembangan, dan aspek pelestarian lingkungan yang perlu menjadi dasar pembangunan kawasan yang berkelanjutan. Artinya, lembaga dan instansi terkait faktor-faktor pendukung tersebut perlu diikutsertakan secara aktif dalam mendorong percepatan pengembangan kawasan.

Daftar pustaka

Akikah, D. (2004). Strategi pengembangan agropolitan di Kabupaten Pandgelang.

UIN Syarif Hidayatullah.

Anonim. 2007. Undang Undang nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Kawasan Agropolitan

Anonim. 2012. PERDA Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Manggarai Timur 2012-203. Manggari Timur

Basuki, Agus., T. 2012. Pengembangan Kawasan Agropolitan dalam Jurnal

Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 13 (hlm.53-71). Yogyakarta:

Ekonomi.

Fajarini, Ulfah. 2014. Penerapan kearifsn Lokal Dalam Pendidikan Karakter dalam

Jurnal Sosio Didaktika, Volume 1. Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah.

Mahi, Ali., K. 2014. Agropolitan Teori dan Aplikasi. Bandar Lampung : Graha

Ilmu

Manik, Theodorik., R, Adrianto, Wisnu., D dan Subagyo, Aris. 2013. Kajian

Pengembangan Kawasan Agropolitan Seroja Kabupaten Lumajang Jurnal

Tata Kota dan Daerah, Volume 5, Nomor 1.

Martadona, Purnamadewi, Yeti., L dan Najib, Mukhamad. 2014. Strategi

pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Tanaman Pangan Di Kota

Padang Jurnal Tata Loka, Volume 16. Padang: Biro Penerbit Planalogi

UNDIP.

Oksatriandhi, Benny dan santoso, Eko., B. 2014. Identifikasi Komuditas Unggulan

di Kawasan Agropolitan Kabupaten Pasaman dalam Jurnal Teknik Pomtis,

Vol. 3. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Pranoto, Sugimin dkk. 2006. Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan Melalui

Model Pengembangan Agropolitan Jurnal Manajemen dan Agribisnis,

Volume 3, Nomor 1.

Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif,kualitatif dan R&D.

Suroyo, Bambang., T dan Handayani, Wiwandri. 2014. Pengembangan Kawasan

Agropolitan di Kabupaten Kulon Progo DIY Jurnal Perencanaan Wilayah

dan Kota, Volume 25, Nomor 3 (hlm, 243-261).

Suyatno, Yulistyo. 2008. Penguatan Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan

Berbasis Peningkatan Daya Saing Produk Agribisnis Unggulan Di

Kabupaten Semarang. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Syamsiar, Ratika., N. 2016. Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis

Partisipasi Di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Dengan

Pendekatan Asset Based Community Development. Makassar: Badan Penerbit UIN Alaud